

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR: 001/KP.01.00/GO/01/2021**

TENTANG

**PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPNS)
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI, BAWASLU KOTA GORONTALO, BAWASLU
KABUPATEN GORONTALO, BAWASLU KABUPATEN BOALEMO, BAWASLU KABUPATEN POHUWATO,
BAWASLU KABUPATEN BONE BOLANGO DAN BAWASLU KABUPATEN GORONTALO UTARA
TAHUN 2021**

KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI GORONTALO

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) pada Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Se Provinsi Gorontalo telah habis masa kontraknya sehingga dipadang perlu untuk mengangkat/mempekerjakan kembali setelah dilakukan evaluasi;
- b. bahwa berdasarkan hasil Evaluasi, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/I/2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

8. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
9. Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-115.01.2. 686438/2021 tanggal 23 November 2020.

- MEMPERHATIKAN :**
1. Pengumuman Nomor 078/GO/SET/KP.04.00/XII/2020 tentang Hasil Evaluasi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo Tahun 2020.;
 2. Pengumuman Nomor 003/GO.06/SET/KP.04.00/XII/2020 tentang Hasil Evaluasi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kota Gorontalo Tahun 2020.;
 3. Pengumuman Nomor 234/SET/GO.03/KP.04.00/XII/2020 tentang Hasil Evaluasi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gorontalo Tahun 2020.;
 4. Pengumuman Nomor 11/SET.GO.01/KP.04.00/XII/2020 tentang Hasil Evaluasi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Boalemo Tahun 2020.;
 5. Pengumuman Nomor 06/GO.05/SET/KP.04.00/XII/2020 tentang Hasil Evaluasi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pohuwato Tahun 2020.;
 6. Pengumuman Nomor 020/SET/GO-02/KP.04.00/XII/2020 tentang Hasil Evaluasi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020.;
 7. Pengumuman Nomor 066/SET/GO.04/TU.0.01/XII/2020 tentang Hasil Evaluasi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Bawaslu Gorontalo Utara Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPNS) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI, BAWASLU KOTA GORONTALO, BAWASLU KABUPATEN GORONTALO, BAWASLU KABUPATEN BOALEMO, BAWASLU KABUPATEN POHUWATO, BAWASLU KABUPATEN BONE BOLANGO DAN BAWASLU KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2021.**
- PERTAMA :** menetapkan nama-nama yang tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) pada Sekretariat Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kota Gorontalo, Bawaslu Kabupaten Gorontalo, Bawaslu Kabupaten Boalemo, Bawaslu Kabupaten Pohuwato, Bawaslu Kabupaten Bone Bolango, dan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2021;
- KEDUA :** Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) sebagaimana Diktum PERTAMA berkewajiban:
1. Melaksanakan Tugas sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi.
 2. Mempunyai Integritas;
 3. Pribadi yang kuat, Jujur dan Adil.
 4. Bertanggung jawab penuh atas tugas-tugas yang sudah ditetapkan.
 5. Taat terhadap disiplin jam masuk kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo.
 6. Dapat bekerja sama yang baik dengan semua Pegawai dilingkup Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo.
 7. Melaksanakan Tugas lain yang diperintahkan oleh Atasan/Pimpinan.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul karena ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Gorontalo
Pada tanggal : 4 Januari 2021



KEPALA SEKRETARIAT
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

[Signature]
ERSON ENTENGO, S.IP.,M.Si
NIP. 19791122 200212 1 008

Lampiran : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Nomor : 001/KP.01.00/GO/01/2021
Tentang : Pengangkatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kota Gorontalo, Bawaslu Kabupaten Gorontalo, Bawaslu Kabupaten Boalemo, Bawaslu Kabupaten Pohuwato, Bawaslu Kabupaten Bone Bolango dan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2021.

DAFTAR NAMA-NAMA PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPNS)
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI, BAWASLU KOTA GORONTALO, BAWASLU
KABUPATEN GORONTALO, BAWASLU KABUPATEN BOALEMO, BAWASLU KABUPATEN POHUWATO,
BAWASLU KABUPATEN BONE BOLANGO DAN BAWASLU KABUPATEN GORONTALO UTARA
TAHUN 2021

1. Bawaslu Provinsi Gorontalo

NO	NAMA	BAGIAN	SUB BAGIAN	KET.
1	Norpin Ahmad, S.IP	Administrasi	Sumber Daya Manusia dan Umum	
2	Awan Abdullah	Administrasi	Sumber Daya Manusia dan Umum	
3	Adityo Setiawan Ibrahim, S.AP	Administrasi	Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Negara	
4	Ahmad Polamolo, SE	Administrasi	Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Negara	
5	Ibnu Lawani	Administrasi	Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Negara	
6	Mustika Hidayat Al Anshori. S.Kom	Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	Pengawasan Pemilu, Akreditasi Pemantau, Data dan Informasi	
7	Ahmad Ali, S.Kom	Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	Pengawasan Pemilu, Akreditasi Pemantau, Data, dan Informasi	
8	Roy Hamrain, MH	Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	Pengawasan Pemilu, Akreditasi Pemantau, Data, dan Informasi	
9	Armin Nur, S.Hi	Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga	
10	Ismi Febrina Mustafa, SH	Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum	Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	
11	Fadli Bukoting, SH	Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum	Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	
12	Yopin Polutu, SH	Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum	Penanganan Pelanggaran	
13	Didit Suhandono, SH	Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum	Penanganan Pelanggaran	

2. Bawaslu Kabupaten Gorontalo

NO	NAMA	SUB BAGIAN	KET.
1	Hadijah Hamzah, SH	Administrasi	
2	Meryani Raisa Adiyanti Mootalu, SE	Administrasi	
3	Verawati Abubakar, S.Kom	Administrasi	
4	Stenly Tinduku, S.Kom	Administrasi	
5	Jefri Fernando A. Hamzah	Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	
6	Hidayat D. Hasan, SH	Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	
7	Noval Katili, SH	Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum	
8	Subarkah Komendangi, SH	Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum	

3. Bawaslu Kota Gorontalo

NO	NAMA	SUB BAGIAN	KET.
1	Farida Muhsin	Administrasi	
2	Rofiudin Jr. Tilome, SE	Administrasi	
3	Sriyanti Lasindrang	Administrasi	
4	Ikbal Arbie, S.Si	Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	
5	Moh. Fahmi Kasim, S.Pi	Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	
6	Ikrar Setiawan Akasse, SH	Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum	
7	Vidya Gumanti, S.Hi	Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum	

4. Bawaslu Kabupaten Boalemo

NO	NAMA	SUB BAGIAN	KET.
1	Fitriyanti T. Pakaya, S.KM., M.Si	Administrasi	
2	Moh. Reza Firmansyah Sofyan, S.Kom	Administrasi	
3	Anwar Hasan, SH	Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	
4	Laylatul Munawaroh, S.I.Kom	Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	
5	Nolvionita Sofyan, SH	Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum	
6	Aldiyanto Ahmad, SH	Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum	
7	Yahya Karuana, SH	Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum	

5. Bawaslu Kabupaten Bone Bolango

NO	NAMA	SUB BAGIAN	KET.
1	Ruliyanto Lantu	Administrasi	
2	Ika Mariana Maksud, SH	Administrasi	
3	Nindi Mokodompit	Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	
4	Agus Laingo, S.AP	Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	
5	Hedy Fauzi Amrullah, S.Kom	Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	
6	Ronal Husain, SH	Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum	
7	Narti Harun	Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum	
8	Lukman Ismail, SH.,MH	Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum	

6. Bawaslu Kabupaten Pohuwato

NO	NAMA	SUB BAGIAN	KET.
1	Fitriani Abdul Azis, S.Kom	Administrasi	
2	Alfris Podungge, SH	Administrasi	
3	Kasim Yanu, S.IP	Administrasi	
4	Indrawaty Saleh, S.Pd	Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	
5	Noldi K. Mohi, SE	Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	
6	Indah Rasid	Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	
7	Nelson Parera, SH	Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum	
8	Mahmud Diko, SH	Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum	

7. Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara

NO	NAMA	SUB BAGIAN	KET.
1	Ida Royana, SE	Administrasi	
2	Sri Mahdalona Machmud, SH	Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum	
3	Rizal Tongkodu, SH	Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum	
4	Amrain U. Koli, S.Pd	Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	
5	Alyasin Tarib, S.IP	Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	
6	Rizq Menashar, SH	Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	

Ditetapkan : di Gorontalo
Pada tanggal : 4 Januari 2021



NIKRON ENTENGO, S.I.P., M.Si
NIP. 19791122 200212 1 008